

**UPAYA INDONESIA UNTUK MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN
KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TAHUN 2019-2020**

Oleh : Rahmiatin Tahdinata Maghfura
rahmiatintahdinatamaghfura28@gmail.com
Pembimbing : Drs.Idjang Tjarsono,M.Si.
Bibliografi : 7 Jurnal, 21 Buku, 26 Website

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain Indonesia's efforts in obtaining UN Security Council seats, describes the UN and the UN Security Council and discuss the interests of Indonesia became a non-permanent members of the United Nations Security Council. The author uses the theory of diplomacy in the frame of the liberal perspective and analysis of the level of the nation State. The method used is descriptive qualitative methods developed by way of research libraries. The discussion started with explaining the historically about the United Nations and UN Security Council which is one of the six main bodies of the United Nations. The UN Security Council has the task of maintaining international peace and security. Then proceed with the interests of Indonesia to become one of non-permanent members of the United Nations Security Council. After it analyzes the efforts Indonesia became a member of non-permanent members of the United Nations Security Council period 2019-2020. The results of this research concluded that the success of Indonesia became a member of the UN Security Council is efforts through a multitrack diplomacy strategy. With the jargon of The True Partner for World Peace Indonesia that compete with Maldives could won a member seat at the UN Security Council. This is not just a triumph of soft power, but it also provides an invaluable opportunity for Indonesia to achieve the national interests, world peace and security as well as enhancing his reputation.

Keywords: Indonesia, The UN Security Council, The National Interest

Pendahuluan

Hari Jum'at tanggal 8 Juni 2018 merupakan salah satu hari pencapaian Indonesia dalam hubungan internasional yaitu terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*non-permanent members of the United Nations Security Council*) untuk periode 2019-2020.¹ Terpilihnya Indonesia ini adalah suatu hasil dari perjuangan diplomasi oleh pemerintah. Sebab Indonesia akan mendapat nilai dan kesempatan lebih untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya jika berhasil menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB karena bisa mempengaruhi dan memberi masukan kepada anggota tetap dewan keamanan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Secara aturan, dewan keamanan PBB memiliki lima anggota permanen yaitu Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Cina. Dan sepuluh anggota tidak tetap yang dipilih dua tahun sekali untuk mewakili representasi regional yaitu lima negara dari regional Afrika dan Asia Pasifik, satu negara dari Eropa Timur, dua negara dari Amerika Latin dan dua negara dari Eropa Barat dan negara lain.

Dewan keamanan PBB memiliki tanggung jawab pokok untuk keamanan dan perdamaian dunia. Tanggung jawab kolektif dewan keamanan untuk mencegah dan melindungi warga dunia.²

¹Manuel Elias, "Germany, Indonesia, South Africa, Dominican Republic, Belgium, elected to Security Council" United Nations <https://news.un.org/en/story/2018/06/1011731/> (Diakses pada 2 Januari 2019).

² Jason Ralph and Jess Gifkins, "The Purpose Of United Nations Security Council Practice: Contesting Competence Claims In The Normative Context Created By The Responsibility To Protect. (*European journal of international*

Sebelumnya Indonesia telah pernah juga menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB yaitu tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Indonesia merasa layak menjadi anggota dewan keamanan PBB karena telah berkontribusi dalam perdamaian dunia dengan mengirimkan tim *peace keeping operations* dan menjadi pemain penting keamanan Asean.³

Pada pemilihan anggota tidak tetap pada tahun 2018 terpilihlah negara-negara sebagai berikut: Belgia, Jerman, Republik Dominika, dan Afrika Selatan dari perwakilan Eropa Barat dan Afrika. Dan untuk perwakilan regional Asia Pasifik terpilih Indonesia setelah menang voting atas Maladewa. Indonesia mendapatkan 144 suara dan Maladewa 46 suara dari total 190 suara negara peserta.⁴ Berdasarkan pidato menteri luar negeri Indonesia Retno Lestari Priansari mengatakan Indonesia akan berkontribusi pada *peace keeping* dan *peace building* serta sinergis antara sesama anggota serta organisasi regional dalam penyelesaian konflik, memerangi radikalisme dan terorisme.

Indonesia mengkampanyekan pertama kali pada tahun 2016 oleh wakil presiden Jusuf Kalla.⁵ Kampanye

relations" vol.23 (2017) P630-653 <http://eprints.whiterose.ac.uk/103089/10/1354066116669652.pdf> (Diakses pada 2 Januari 2019).

³ KBRI Brussel, "Indonesia-layak-menjadi-Anggota-Tidak-Tetap-Dewan-Keamanan-DK-PBB" <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/> (Diakses Pada 3 Januari 2019).

⁴Natalia Santi, "Indonesia-terpilih-sebagai-anggota-tidak-tetap-dk-pbb" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180608220834-134-304758/> (Diakses pada 3 Januari 2019)

⁵Liz, "Indonesia-launches-campaign-for-un-security-council-seat"

mengusung tema “*The True Partner for World Peace*” untuk meyakinkan publik luar negeri bahwa Indonesia layak memegang jabatan di dewan keamanan PBB. Hasil pemilihan ini bukanlah akhir perjuangan untuk Indonesia tapi adalah awal perjalanan bersama untuk terus mengadvokasi keamanan dan perdamaian dunia. Indonesia resmi menduduki posisi tersebut per 1 Januari 2019 dan meminta dukungan dari negara anggota. Untuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan ada persaingan yang tidak mudah.

Setelah mempromosikan bahwa Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB berbagai usaha negosiasi diplomasi dilakukan. Karena untuk menempati jabatan tersebut harus mendapat dukungan suara minimal dua per tiga dari total jumlah negara di majelis umum PBB dengan mekanisme voting.

Pada pemilihan untuk periode 2019-2020 dari perwakilan kawasan Asia Pasifik Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Indonesia tentu tidak diam diri dan pasrah akan tetapi melakukan upaya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk sukses menjadi anggota DK PBB.

Dari sisi kepentingan nasional jelas bahwa keamanan dunia menjadi kewajiban bagi Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Kemudian dikaitkan juga dengan visi pemerintah saat ini yaitu menjadi poros maritim duniadan mengamankan *global maritime security*.⁶ Artinya kemanan

khususnya maritime menjadi konsen pemerintah dan ini akan sangat dibantu jika ada jabatan yang relevan di tingkat Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka dalam tulisan ini akan menganalisis tentang bagaimana upaya Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB periode 2019-2020. Kajian ini menarik bagi penulis karena akan menelaah upaya Indonesia yang berhasil menjadi bagian dari anggota suatu lembaga yang sangat berpengaruh dan bergengsi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara negara sahabat di ASEAN yaitu Thailand tak berhasil atau kalah dari Kazakhstan yang terpilih jadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB pada persaingan pemilihan pada periode jabatan 2016-2018.

Kerangka Teori

Dalam tradisi ilmiah, untuk menjelaskan sesuatu kasus terjadi diperlukan teori. Karena teori dapat membantu seorang peneliti dalam mengkaji masalah yang akan diteliti.⁷ Tulisan ini akan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori diplomasi dalam perspektif liberalisme dari Henry R Nau serta dengan konsep *collective security*, *national interest*, *peace keeping* dan *peace building*. Dengan menggunakan kerangka teori di atas diharapkan bisa membantu penulis dalam

“*Indonesia’s Global Maritime Axis : Security Concern And Recommendations*”
<https://ejournal.unair.ac.id/JHI/article/download/7306/4421> Vol X. No.2 (Juli-Desember 2017) (Diakses 3 Januari 2019).

⁷Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta:LP3ES. 1990), 186-187.

<https://www.thejakartapost.com/news/2016/09/23/.html> (Diakses pada 3 Januari 2019).

⁶ Dewi Santoso dan Fadhillah Nafisah,

mengkaji bagaimana upaya Indonesia untuk menjadi anggota tetap dewan keamanan PBB periode 2019-2020.

Kemudian dalam menelaah kasus dalam hubungan internasional, lebih baik menyertakan tingkat analisis. Ada empat tingkat analisis yaitu individu, negara, sistem negara dan sistem internasional.⁸ Penulis memakai tingkat analisis negara. Dimana kajian akan fokus pada upaya negara untuk memenangi kontestasi diplomasi untuk sebuah kursi jabatan dalam suatu lembaga internasional. Asumsinya adalah negara akan berupaya untuk memenangi setiap negosiasi dalam kontestasi hubungan internasional. Sehingga, analisis akan lebih fokus pada upaya negara karena hubungan internasional pada dasarnya diwarnai oleh negosiasi antar negara.⁹ Dalam kasus ini Indonesia akan menjadi objek utama.

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan riset kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data dari sumber pertama atau kedua. Berikutnya, dilanjutkan dengan membongkar data yang telah dikumpulkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau mereduksi data. Terakhir ialah penyajian data yang sudah di reduksi dan seterusnya verifikasi lalu setelah itu penarikan kesimpulan.¹⁰

Dalam referensi diplomasi ada dikenal dengan diplomasi multi/banyak jalur (*multy-track diplomacy*).

Diplomasi Multijalur memiliki

sembilan *track* yaitu¹¹:

1. *Government, or peacemaking through diplomacy*. Jalur ini merupakan pekerjaan sehari-hari diplomat seperti melakukan diplomasi resmi dan pembuatan kebijakan luar negeri yang dihasilkan melalui proses-proses resmi. Bidang ini mencakup bagaimana proses formal diplomasi, perumusan kebijakan dan perdamaian melalui ofisial dan institusi pemerintahan dijalankan.
2. *Non government/professional, or peacemaking through conflict resolution*. Peran dari lembaga jalur ini adalah sebagai pencegah terjadinya suatu konflik atau penanganan dan penyelesaian konflik yang muncul. Kegiatan ini bisa mencakup negosiasi, advokasi, penyadaran, memberi tekanan melalui berbagai cara seperti boikot, protes, demonstrasi dan lain-lain.
3. *Business, or peacemaking through commerce*. Kegiatan diplomasi ini dapat berupa tindakan yang nyata dan memiliki dampak potensial dalam berbagai kesempatan dalam menentukan kebijakan ekonomi, kerja sama bisnis, komunikasi informal seperti *business gathering, business party, roundtable meeting, bazar, promotion, and exhibition* dan lainnya.
4. *Private citizen, or peacemaking through personal involvement*. Peran warga negara atau

⁸ K.J. Holsti, *International Politics, A Framework For Analysis: Sixth Edition* (New Jersey: Prentice-Hall International Editions, 1992), 6.

⁹ Rourke, *International Politics on The World Stage*. (New York: Mcgraw-Hill, 2003), 54.

¹⁰ Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial "Konsep-Konsep Kunci"*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015) 11-12.

¹¹ Louise Diamond dan John McDonald, *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, (West Hartford: Kumarian Press, 1996).

perorangan atau individu tertentu di suatu negara, dalam diplomasi kadang-kadang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

5. *Research, training, and education, or peacemaking through learning.* Jalur ini sangat penting karena memiliki peran yang cukup besar dalam diplomasi, karena penelitian berhubungan dengan program-program universitas, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan yang menyediakan pelatihan seperti kemampuan negosiasi, mediasi, penyelesaian konflik, dan fasilitasi pihak ketiga.
6. *Activism, or peacemaking through advocacy.* Jalur ini biasanya didasarkan pada isu-isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokrasi, keadilan, dan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
7. *Religion, or peacemaking through faith in action.* Dalam jalur ini terdapat peran-peran komunitas keagamaan serta tokoh-tokohnya. Gerakan moral, perdamaian, dan antikekerasan sangat berperan di jalur ini.
8. *Funding, or peacemaking through providing resources.* Jalur ini menunjuk pada peran lembaga-lembaga pendanaan seperti yayasan, gerakan amal, individu yang dermawan, yang menyediakan dukungan keuangan bagi kegiatan-kegiatan diplomasi.
9. *Communications and the media, or peacemaking through information.* Pada jalur ini kegiatan seperti menyuarakan kepentingan tertentu akan mempengaruhi opini publik.

Biasanya diekspresikan dalam bentuk publikasi media seperti, film, video, radio, seni, dan alat komunikasi lainnya.

Mencapai tujuan tentu tidak cukup dengan satu jalur saja, apalagi tujuannya sangat tinggi seperti Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Tulisan ini akan dibantu oleh teori *multy-track diplomacy*. Teori ini akan berusaha menjelaskan upaya dan langkah-langkah digunakan Indonesia dengan *changing cultural mindsets* perwujudan diplomasi *zaman now* untuk bisa menduduki status sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa.

Pembahasan

PBB terbentuk setelah Perang Dunia ke-II berakhir, Pada awalnya PBB lahir dari semangat untuk mengakhiri perang yang terjadi di masa Perang Dunia II. negara-negara yang menjadi sponsor utama pembentukan organisasi dunia ini adalah mereka yang menang dalam perang tersebut yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet, dan Republik Rakyat Tiongkok, negara-negara inilah yang selanjutnya mempunyai hak veto pada Dewan Keamanan PBB.

Asas dan tujuan dari PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan, mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak-hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa.¹² PBB mengambil tindakan-tindakan yang tepat guna memperkuat perdamaian dunia dan mewujudkan kerja

¹² Vanessa Manhire, *United Nations Handbook 2017-18*, (Wellington: Ministry Of Foreign Affairs And Trade, 2017)

sama internasional dalam memecahkan masalah- masalah internasional dalam ekonomi, sosial, kebudayaan atau kemanusiaan. Penyusunan organisasi PBB adalah terdiri dari organ-organ pokok sesuai dengan tujuan didirikannya PBB, yang terdiri sebagai berikut: ⁷ Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, Sekretariat.

Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke 60. DK PBB adalah salah satu dari 6 organ utama PBB, dengan mandat utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan merupakan badan utama PBB yang keanggotaannya dibagi kedalam dua jenis, yaitu anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota Dewan Keamanan PBB berjumlah 15 orang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat 1 Piagam PBB. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB berjumlah lima negara, sedangkan sepuluh negara lainnya adalah anggota tidak tetap yang akan menjabat selama dua tahun.

Negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah memegang status tersebut sejak awal pembentukannya, dan status keanggotaan tersebut tidak tergantikan. Lima negara anggota tetap DK PBB tersebut adalah Amerika Serikat, China, Inggris, Perancis, dan Rusia. Sedangkan sepuluh anggota lainnya yang berstatus anggota tidak tetap dipilih dalam Sidang Umum, setiap tahunnya akan dipilih 5 negara.

Selain masa jabatan anggota tetap DK PBB yang tidak dapat digantikan, yang membedakan anggota tetap dengan anggota tidak tetap berada pada kepemilikan hak veto, yang mana hak veto ini hanya dimiliki oleh anggota tetap

saja. Hak veto adalah hak yang dimiliki oleh lima anggota tetap DK PBB, yang mana hak tersebut memiliki kekuatan untuk membatalkan keputusan DK PBB atau yang lebih dikenal dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Setiap tahunnya, Majelis Umum PBB memilih lima anggota tidak tetap DK PBB, untuk masa jabatan selama dua tahun. Untuk dapat dipilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB, sebuah negara harus memenuhi syarat yaitu berkontribusi dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, sesuai aturan nomor 143 *Rule of Procedure* Majelis Umum PBB.¹³ Negara yang akan mencalonkan sebagai anggota tidak tetap DK PBB juga harus memperoleh suara mayoritas dua pertiga dari jumlah seluruh negara anggota Majelis Umum, seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 3 Piagam PBB.¹⁴

Tabel 1 Susunan Anggota DK PBB Sebelum Indonesia Terpilih¹⁵

Negara	Status Keanggotaan	Negara	Status Keanggotaan
Amerika Serikat	Tetap	Kuwait	2018-2019
Inggris	Tetap	Peru	2018-2019
Perancis	Tetap	Polandia	2018-2019
Rusia	Tetap	Afrika Selatan	2019-2020
China	Tetap	Belgia	2019-2020
Côte d'Ivoire	2018-2019	Dominika (Republik)	2019-2020
Equatorial Guinea	2018-2019	Jerman	2019-2020

Tabel 2 Anggota Dewan Keamanan PBB setelah Indonesia Terpilih

No.	Negara	Regional	Periode
	Anggota Tetap		
1.	Amerika	Eropa	Sejak 1946

¹³ *Ibid*

¹⁴ United Nations, *Basic facts about the united nations* (New York: The United Nations Department of Public Information, 2011).

¹⁵<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerja-sama-multilateral/Pages/Keanggotaan-dan-Pengambilan-Keputusan.aspx>

	Serikat	Barat dan lainnya	
2.	Inggris	Eropa Barat dan lainnya	Sejak 1946
3.	Perancis	Eropa Barat dan lainnya	Sejak 1946
4.	Rusia	Eropa Timur	Sejak 1991 menggantikan Uni Soviet
5.	China	Asia Pasifik	Sejak 1971 menggantikan Taiwan
	Anggota Tidak Tetap		
6.	Belgia	Eropa Barat dan lainnya	2019 – 2020
7.	Republik Dominika	Amerika Latin dan Karibia	2019 – 2020
8.	Guinea Ekuatorial	Afrika	2018 – 2019
9.	Jerman	Eropa Barat dan lainnya	2019 – 2020
10.	Indonesia	Asia Pasifik	2019 – 2020
11.	Pantai Gading	Afrika	2018 – 2019
12.	Kuwait	Asia Pasifik	2018 – 2019
13.	Peru	Amerika Latin dan Karibia	2018 – 2019
14.	Polandia	Eropa Timur	2018 – 2019
15.	Afrika Selatan	Afrika	2019 – 2020

Keanggotaan Indonesia sebagai dewan keamanan PBB merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebaik mungkin sesuai konstitusi. Karena banyak yang telah dikorbankan seperti finansial, waktu, pikiran dan tenaga untuk menduduki posisi yang bergengsi tersebut maka

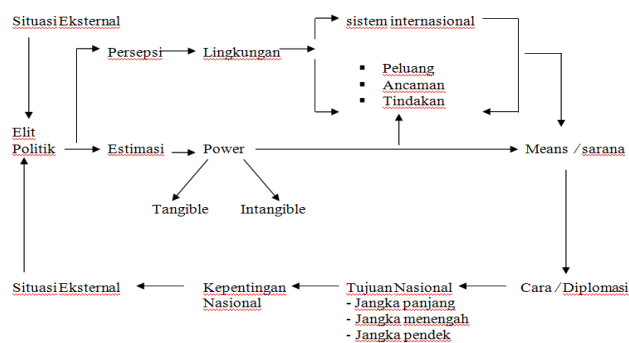
harus dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan internasional.

Kepentingan Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.¹⁶ Kepentingan nasional diidentikkan dengan tujuan nasional. Kepentingan nasional diasosiasikan dengan tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, keamanan, militer, dan budaya. Kebijakan luar negeri dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara.¹⁷

Menurut aliran arus utama dalam Studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan internasional.

Skema 1 Proses Pencapaian Kepentingan Nasional dengan Diplomasi¹⁸



¹⁷ Iqbal Ramadhan, "Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Intermedic": Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Volume 2, No. 2, Mei 2018 (109-115) doi:10.24198/intermedic.v2n2.1

¹⁸ I.G. Wahyu Wicaksana, "A Guide To Theory": Epistemologi Politik Luar Negeri Jurnal global dan strategis, No. 1, Januari 2007, 12-19. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5d8f9755662full.pdf>. (diakses 26 Maret 2019)

Hubungan internasional dikonstruksi sebagai hubungan timbal balik antar politik luar negeri demi memperjuangkan tujuan nasional masing-masing negara-bangsa.¹⁹ Politik luar negeri selalu dilandasi oleh kepentingan nasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional negara bangsanya.

Berbicara kepentingan nasional Indonesia dalam politik internasional termuat dalam visi misi Presiden Jokowi yaitu:²⁰

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
- b. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
- c. Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam
- d. Memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian antar peradaban, memajukan demokrasi dan perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia
- e. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global
- f. Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau

¹⁹ Theodore A Coulombus, & James.H.Wolfe, *Introduction to International Relation: Power and Justice*. (New Delhi: Prentice Hall, (1999).

²⁰ Fabian Januarius Kuwado, "Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?" <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/17563621/politik-luar-negeri-jokowi-jk-dalam-4-tahun-apa-saja-pencapaiannya?page=all>. Diakses 26 Maret 2019

terdepan

g. Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan

h. Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia

i. Membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI)

j. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik (*conflict resolution*), penjagaan perdamaian (*peace-keeping*) dan bina perdamaian (*peace-building*). Kepentingan-kepentingan diatas yang ingin di wujudkan Indonesia jika menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

Menerjemahkan visi ke dalam bentuk aksi adalah pekerjaan yang membutuhkan keseriusan. Pemerintahan Jokowi mencoba untuk mencapainya.

Kepentingan Keamanan Nasional Indonesia

Konstitusi mewajibkan bangsa Indonesia untuk turut serta dalam upaya internasional maupun regional untuk memelihara keamanan dan perdamaian sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan keamanan dan ketertiban dunia. Oleh karena itu, bagi Indonesia adalah penting untuk menampakkan dirinya sebagai suatu negara yang menangani setiap permasalahan dan bersungguh-sungguh serta untuk

menunjukkan bahwa kekuatan yang dimilikinya mempunyai kemampuan yang harus diperhitungkan.

Ada empat hal yang jadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia yaitu menjaga keutuhan NKRI, perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang ada di luar negeri, diplomasi ekonomi serta pentingnya kontribusi Indonesia kepada dunia internasional.²¹ Tiga hal pertama merupakan cerminan kepentingan nasional dan kontribusi Indonesia terhadap dunia yang terbagi menjadi dua yaitu perdamaian dan kesejahteraan. Lalu keamanan maritim salah satu kepentingan Indonesia.

Ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu persekutuan atau pakta pertahanan, memperkuat keharusan untuk selalu bersandar pada kemampuan sendiri. Di samping itu, kepentingan Indonesia terhadap perdamaian dunia, khususnya keamanan di kawasan Asia Tenggara, mewajibkan bangsa Indonesia untuk turut serta dalam upaya internasional maupun regional untuk memelihara keamanan dan perdamaian. Beban kewajiban ini dapat berupa suatu kekuatan pemelihara perdamaian, sebagai salah satu sahamnya dalam kerjasama internasional.

Sebagai suatu bangsa yang cinta damai, Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian pertentangan melalui jalan kebijaksanaan politik dari pada jalan militer. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu, kemampuan Hankamnas yang berdiri di belakangnya, sering berguna

untuk mendukung kebijaksanaan politik.

Kepentingan-kepentingan nasional lain menuntut dijalankannya politik bebas dan aktif oleh Indonesia. Politik bebas dan aktif juga bertujuan turut serta dalam usaha mencapai dan memelihara perdamaian dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sangat besar pengaruhnya terhadap segenap upaya pembangunan nasional.

Panglima TNI periode 2015-2017 Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Indonesia sebagai negara sangat strategis, memiliki garis pantai terpanjang setelah Kanada. Menurut beliau saat ini sudah ada enam ancaman asing yang mencoba merongrong kedaulatan NKRI.²² Pertama, di selatan Maluku ada Pulau Saumlaki, Pulau Selaru, dan Pulau Masela. Lokasi pulau-pulau ini hanya 400 kilometer dari Darwin, Australia. Di selatannya tiga pulau itu ada Blok Masela yang memiliki kandungan gas dan minyak di bawah permukaan air laut. Ini jadi perhatian karena sebelumnya kita kalah Perang Proxi hingga akhirnya Timor Timur lepas dari Indonesia. Di Darwin sudah ada 1500 sampai 2500 personel *US Marine*.

Ancaman kedua yaitu ada pelanggaran zona ekonomi eksklusif di Pulau Natuna yang dilakukan Tiongkok. Setidaknya tiga kali kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok masuk ke wilayah ZEE Pulau Natuna. Tiga kali kejadian itu tertangkap dan tiga kapal itu dikawal kapal *coastguard*. Filipina juga mengalami hal sama, dan sudah mengajukan pengadilan internasional. Pada 12 juli 2015 pengadilan

²¹ Rosikhan Anwar, Kebijakan Luar Negeri Cerminkan Kepentingan Nasional <https://career.undip.ac.id/smupdate/read/1021544/kebijakan-luar-negeri-cerminkan-kepentingan-nasional> (diakses 26 Maret 2019)

²² Teuku Muhammad Guci Syaifudin, Panglima TNI Beberkan 6 Ancaman terhadap Indonesia, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/23/panglima-tni-beberkan-6-ancaman-terhadap-indonesia>

internasional menolak klaim Tiongkok. Sehari setelah itu Presiden Cina tidak mengakui hasil hukum itu. Menlunya menetapkan zona pertahanan udara, jadi seluruh pesawat harus izin kalau tidak ditembak.

Ketiga, Indonesia dikepung kekuatan yang disebut *Five Power Defence Arrangement* (FPDA). Kekuatan militer yang terdiri dari negara-negara bekas persemakmuran Inggris. Mereka pun sudah latihan bersama dengan melibatkan 3 ribu personel, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur, dan kapan selam.

Keempat, ancaman terorisme. Terorisme di Indonesia memperoleh tempat yang indah, aman, dan nyaman karena ditindak setelah berbuat. Di Singapura teroris tidak tenang karena langsung ditangkap ketika baru berencana.

Kelima, Indonesia mulai dihujani narkoba jenis sabu. Sama halnya ketika Tiongkok kalah pada Perang Candu ketika melawan Inggris. Masyarakat sampai militer Tiongkok menjadi pecandu sehingga kalah dalam perang itu. Saat ini Indonesia mulai mengalami Perang Candu meski bentuknya narkoba. Penyitaan sabu BNN pada 2013 542,6 kilogram. Pada 2014 ada 1,1 ton. Pada 2015 ada 4,5 ton. Sementara 1 ton sabu itu dikonsumsi 2,5 juta orang. Artinya pada 2015 ada 22 juta konsumen di Indonesia. Ini memang disiapkan agar kita jadi generasi dengan akal yang tidak sehat, yang mudah ditipu.

Terakhir, persaingan ekonomi. Bonus demografi Indonesia memiliki banyak usia produktif yang dapat melahirkan kesenjangan sosial. Hal itu dipengaruhi jika tidak pendidikan minim, peluang kerja kecil, dan ekonomi memburuk.

Telihat bahwa tantangan yang dihadapi begitu kompleks mulai dari tradisional dan non tradisional. Dari dalam negeri juga mengancam gerakan separatisme Papua. Semua ancaman ini harus bisa diatasi pemerintah. Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo telah menunjukkan beberapa pelaksanaan diplomasi yang cukup signifikan baik secara bilateral maupun multilateral dan menjadi catatan dan perhatian internasional.

Diplomasi sebagai sarana kepentingan nasional tanpa penggunaan kekerasan dilakukan Indonesia. Selain diplomasi kemanusiaan yang dilancarkan pemerintah Indonesia secara bilateral dalam kasus Rohingya dengan para penguasa di Myanmar. Diplomasi lainnya adalah diplomasi Maritim yang dilaksanakan secara multilateral pada masa kepemimpinan Indonesia pada IORA atau Asosiasi Kerja Sama Lingkar Samudera Hindia 2015-2017 dan diplomasi multi jalur yang dipraktikkan dalam upaya menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Dengan melihat berbagai rujukan, maka kepentingan nasional Indonesia dalam hal keamanan negara terkait dengan sejumlah aspek penting, antara lain:²³

Keuntungan bagi Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB

Sejalan dengan prinsip politik luar negeri yang ada, keanggotaan Indonesia pada DK PBB perlu membawa manfaat nyata bagi rakyat, baik dari sisi politis maupun ekonomi. Dalam hal ini, sejumlah manfaat strategis keanggotaan

²³ Bambang Darmono, dkk. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia* (Sekretariat Jenderal, Dewan Ketahanan Nasional, 2010)

Indonesia di Dewan Keamanan PBB antara lain:²⁴

1. Bentuk perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia. Dengan meningkatkan kapasitas Indonesia bersuara dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia.
3. Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian (MPP) Indonesia. Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel dan menempatkan 4.000 personel di berbagai MPP PBB.
4. Memperbesar peluang untuk mendorong reformasi DK PBB, utamanya *working method*.

Diplomasi *Multi-Track* Indonesia dalam Memperoleh Kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2019-2020

Berkontestasi dengan Maladewa membuat Indonesia mengeluarkan strategi-strategi diplomasi yang handal dengan multi jalur. Memadukan kepentingan nasional dan kepentingan internasional menjadi taktik yang harus dipertimbangkan.

Menlu Retno mengatakan, *not only diplomat* yang bekerja, tapi semua elemen anak bangsa ikut menyebarkan. Merujuk pada teori *multi track diplomacy*

dan data-data yang ditemukan dari berbagai sumber maka penulis menganalisis bahwa dari sembilan track, Indonesia menggunakan tiga yaitu *track 1*, *track 3*, dan *track 9*. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan dibawah ini.

Diplomasi *Government to Government* sebagai *Track One*

Dalam jalur pertama yaitu pemerintah (*government*) yang melakukan aksi diplomasi secara langsung. Jalur ini merupakan pekerjaan sehari-hari diplomat seperti melakukan diplomasi resmi dan pembuatan kebijakan luar negeri yang dihasilkan melalui proses-proses resmi. Bidang ini mencakup bagaimana proses formal diplomasi, perumusan kebijakan dan perdamaian melalui ofisial dan institusi pemerintahan dijalankan seperti untuk bina perdamaian melalui diplomasi (*peacemaking through diplomacy*). Dalam sistem ini ada kelembagaan pemerintahan yakni eksekutif melalui departemen luar negeri, legislatif melalui parlemen dan yudikatif melalui departemen kehakiman.

Langkah *government to government (G to G)* telah Indonesia lakukan diawali dengan aksi kampanye di sidang majelis umum PBB dengan mengusung tema *the true partner for worldpeace*. Indonesia meluncurkan kampanye untuk pencalonan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Kamis tanggal 22 September 2016, pukul 18.30-20.30 waktu setempat.

Kampanye ini langsung sampaikan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Dalam usaha kampanye ini, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan

²⁴ Kemlu, *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB*
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/keanggotaan-DK-PBB.aspx>
(Diakses 26 Maret 2019).

bertemu dengan beberapa kepala negara dan pemerintahan yang belum menyatakan dukungan kepada Maladewa.²⁵

Sebagai *follow up* nya Indonesia melakukan acara resepsi diplomatik dengan mengundang 200 negara di markas PBB. Resepsi diplomatik yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-71 RI di sela-sela sidang Majelis Umum PBB. Dalam resepsi ini Indonesia lebih intens melobi agar mendapat dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Indonesia memanfaatkan momentum sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), untuk melobi negara-negara lainnya.

Gambar 1 Wapres, Menlu, dan Dubes Indonesia berkampanye



Menlu memaparkan Indonesia berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan pada mereka yang membutuhkan baik dikarenakan bencana alam maupun sebagai korban perang atau konflik bersenjata. Melalui kerangka ini Indonesia terpenggil untuk berperan aktif dalam Dewan Keamanan PBB.

²⁵ Muhammad Taufiqqurrahman, *Indonesia Berjuang Jadi Anggota Tak Tetap DK PBB*
<https://news.detik.com/berita/d-3648671/indonesia-berjuang-jadi-anggota-tak-tetap-dk-pbb> (diakses 5 April 2019)

Pengalaman Indonesia melalui ASEAN merupakan modalitas kuat untuk berkontribusi secara signifikan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah banyak berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian dunia dan upaya ini akan terus dilakukan pada masa mendatang bersama masyarakat internasional. Jadi mengajak berbagai pihak untuk memberikan dukungan penuh atas pencalonan Indonesia tersebut. *Follow up* dari resepsi ini adalah mengirim utusan khusus menggalang dukungan yaitu Nur Hassan Wirajuda, M.Lutfi, dan Mahendra Siregar. Indonesia menyadari bahwa menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB butuh keseriusan. Indonesia juga melakukan kunjungan ke Argentina, Peru, New York, dan Guyana pada 20 Mei 2018 membicarakan kursi untuk Indonesia. Lalu lobi saat acara buka bersama (iftar) pada 3 Juni 2018.²⁶ Retno mengungkapkan sangat optimis melihat *track record* dan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia yang menjadi alasan negara lain mendukungnya.

Pertemuan selanjutnya pada hari Kamis, Retno berbicara ke Parlemen Inggris bidang luar negeri dan *Commonwealth Office (minister for Asia and the Pacific)* yaitu Alok Sharma. Dimana Inggris merupakan salah satu dari lima Negara anggota permanen DK PBB. Pertemuan ini mendiskusikan penguatan hubungan bilateral dalam perdagangan, infrastruktur, pencegahan radikalisme dan

²⁶ Dian Septiari, *Indonesia to ramp up lobbying for UN Security Council seat*, <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/29/indonesia-to-ramp-up-lobbying-for-un-security-council-seat.html> (dikases 6 April 2019)

promosi toleransi.

Retno juga menyampaikan harapan bahwa akan didukung juga oleh *United Arab Emirates*, Fiji, Papua New Guinea dan Timor Leste. Pada 19 September Retno melakukan *meeting* dengan menteri luar negeri Slovakia yaitu Miroslav Lajcak. Pada pertemuan ini keduanya menyetujui saling mendukung satu sama lain. Dimana Slovakia berniat untuk jadi DK PBB periode 2028-2029.²⁷

Memperoleh minimal 129 atau 2/3 suara dari jumlah negara anggota PBB membutuhkan perjuangan yang sangat serius. Tim diplomat Indonesia seperti Dian Triansyah Jani, Desra Percaya (Dirjen Asia-Pasifik kemlu), Febrian Ruddyard (Dirjen kerjasama multilateral kemlu) dan Hasan Kleib (dubes Indonesia untuk PBB di Jenewa dan Switzerland) bekerja dengan sungguh-sungguh.

Pada hari Rabu di New York, Menlu Retno bertemu dengan rekanan dari Gabon, dan juga perwakilan dari Italy, Singapore, Gambia, Algeria, Comoros, the Netherlands, Bolivia, Liberia, Tanzania, Sweden and Nauru.

Pada hari Kamis Retno pergi ke Washington untuk bertemu dengan *United States Secretary of State* yaitu Mike Pompeo untuk meminta dukungan. Pemerintah juga mengirim utusan khusus yaitu Hassan untuk Afrika. Manta menteri perdagangan M. Lutfi untuk *Pacific Island Countries* dan *Caribbean*. Dan mantan kepala badan investasi Mahendra Siregar, untuk mencari

dukungan bagian Eropa.²⁸ Penunjukkan terhadap tokoh ini diharapkan bisa mempermudah lobi meminta dukungan dari negara anggota majelis umum PBB.

Business sebagai Track Three Mencapai DK PBB

Jalur ketiga yaitu diplomasi melalui *business*. *Track* ini berada dalam lingkup bisnis yang membawa implikasi dari pembangunan perdamaian antar negara melalui ketentuan-ketentuan ekonomi, hubungan dagang yang bersahabat, serta kerja sama yang mutual.²⁹ Dinamika kegiatan komersial sangat berpengaruh bagi perekonomian negara sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan luar negeri.

Para pelaku bisnis tidak serta-merta ditempatkan sebagai diplomat, namun segala negosiasi yang melibatkan uang, sumber daya, dan tenaga kerja pasti melibatkan proses diplomasi antar negara sehingga berbagai negosiasi bisnis ini dapat dijuruskan sebagai negosiasi damai secara *de facto*. Ini dilakukan dengan promosi sekaligus jamuan produk kopi nusantara di PBB.

Maksud dibelakang ini ialah ingini menyampaikan pesan bahwa bukan hanya manusia Indonesia yang mencintai damai tapi di dalam rasa tumbuhan kopi asli Indonesia juga memiliki nilai makna filosofis bahwa kedamaian dimulai dari alam pikiran dan diusahakan di kenyataan dengan menikmati kopi Indonesia di

²⁸ Dian Septiari, Tama Salim, *Indonesian top brass go all out to win UNSC seat*, <http://www.asianews.eu/content/indonesian-top-brass-go-all-out-win-unscc-seat-74396>

²⁹ Karolina Kupinska.. *Contemporary Multi Track Diplomacy across the Taiwan Strait*. Tesis Magister. Taipei: Graduate School of International Affairs, (Ming Chuan University, 2010) 2-19.

²⁷ Liza Yosephine, *Indonesia begins lobbying for UN Security Council seat*, <https://www.thejakartapost.com/news/2016/09/26/indonesia-begins-lobbying-for-un-security-council-seat.html> (diakses 6 April 2019)

markas PBB.

Kegiatan ini melibatkan pemilik bisnis *Blanco Coffee* beserta pemilik perkebunan kopi *Perdipe* di pulau Sumatera. Ini berhubungan dengan upaya melalui jalur ke tiga dalam *multi track diplomacy*. Melibatkan peran para pelaku bisnis melalui peluang kegiatan kerjasama internasional di bidang ekonomi guna menjalin relasi dengan negara-negara lain melalui komunikasi ataupun jaringan bisnis untuk membantu menciptakan perdamaian dan memperkuat interaksi kerjasama bisnis dan perekonomian antarnegara.

Hal yang dapat mendorong adanya diplomasi jalur ketiga ini adalah adanya ketergantungan, atau dengan kata lain suatu negara tentu menginginkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, oleh karena itu dibutuhkanlah kerjasama demi meningkatkan perekonomian negara tersebut. Kekurangan dari jalur ini ialah sumberdaya alam maupun manusia menjadi tidak terkontrol.

Pada pertemuan tersebut perwakilan negara sangat mengapresiasi kedamaian yang ada dalam menikmati kopi dan kepemimpinan Indonesia dalam mengurangi tingkat krisis pangan di beberapa negara saat itu. memandang bahwa Indonesia dapat mengambil peran lebih besar baik dalam konteks regional maupun global. Negara lain memandang bahwa Indonesia dapat mengambil peran lebih besar baik dalam konteks regional maupun global.

Media Communication sebagai Track Nine untuk Kursi DK PBB

Media komunikasi merupakan alat untuk membentuk opini publik secara efektif terhadap berbagai macam isu yang mampu disebarkan hingga melewati

batas-batas negara. Penggunaan sarana teknologi informasi dilaksanakan melalui persebaran informasi dan jalinan komunikasi. Tugas utama dari teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai perdamaian, resolusi konflik, dan hubungan internasional kepada masyarakat.

Dalam *track* ini, opini publik dibentuk dan disuarakan melalui media cetak dan media elektronik. Sisi *track* ini membantu mengomunikasikan transparansi pemerintah. Keuntungan dari diplomasi jalur ini adalah proses penyebaran informasi yang cepat.

Seiring perkembangan internet dan jejaring sosial, media lokal di masing-masing negara maupun media internasional seperti seperti I News TV, Tweeter, Channel You Tube Kemlu TV, Antara TV, KBRI Astana dan pentas Angklung di PBB untuk membantu menggencarkan perolehan simpati dan support negara lain memiliki peran penting dalam jalannya *track* ini.

Seiring dengan merebaknya globalisasi diseluruh dunia, media semakin berperan penting karena dengan mudah menyebarkan informasi maupun peristiwa teraktual dari seluruh belahan dunia melalui televisi maupun jaringan internet, sehingga sangat membantu dalam proses penyelenggaraan diplomasi suatu negara.

Media massa patut diperhitungkan karena berpotensi menciptakan opini publik. Karena, mobilisasi opini publik melalui pencitraan media yang konsisten akan mempengaruhi dinamika diplomasi yang diimplementasikan dalam *foreign policy* negara. Kelebihannya yaitu, diplomasi akan terasa lebih terbuka bagi masyarakat akibat informasi yang disiarkan oleh media massa.

Lalu juga dengan pelaksanaan pameran angklung “*Learn From Pring*” bertajuk “*Bamboo For Peace: Enchanting Sounds and Rhythms of Indonesia*” yang melibatkan komunitas seni saung angklung Udjo dari Bandung di Markas PBB. Pentas seni ini dihadiri 500 diplomat dari 193 negara dan pejabat tinggi PBB yang memenuhi ruangan ECOSOC di Markas PBB, New York. Hal ini terkait dengan upaya menjadi DK PBB dengan menggunakan jalur ke sembilan dalam *multi track diplomacy*.

Hasil dari *multi track diplomacy* di atas Indonesia berhasil meraup 144 suara dari 193 negara di majelis umum PBB yang diumumkan Presiden Majelis Umum Miroslav Lajcak. Pencapaian ini melebihi suara minimal yaitu 127. Sedangkan saingan tunggal Indonesia yaitu Maladewa hanya mendapat 46 suara.

Simpulan

Keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB merupakan upaya melalui jalur *multitrack diplomacy*. *Multi track diplomacy* berperan sebagai upaya dan alat Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB. Memenangkan kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB bagi Indonesia bukan hanya kemenangan *soft power*, tetapi juga memberikan kesempatan yang tak ternilai bagi Indonesia untuk mencapai tujuan perdamaian dan keamanan serta meningkatkan reputasinya khususnya di regional Asia Pasifik dan dunia pada umumnya.

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus bisa merepresentasikan dan memperjuangkan

kepentingannya. Perlu juga untuk mengkampanyekan perdamaian dalam pandangan alam Islam (*Islamic Worldview*). Serta meluruskan pandangan negatif yang keliru selama ini bahwa Islam adalah agama cinta damai dan bukanlah identik dengan terorisme.

Multi track diplomacy harus terus digunakan digunakan untuk *peace keeping* dan *peace building* di dunia. Isu yang juga harus diperhatikan Indonesia saat duduk sebagai anggota tidak tetap DK-PBB yaitu diantaranya upaya penyelesaian Palestina dan perhtian yang lebih untuk penyelesaian isu Rohingya. Kemudian isu perlombaan senjata pemusnah massal dan *non traditional security*. Selain semua itu, Indonesia juga perlu fokus pada isu-isu yang menyangkut internal Indonesia, seperti separatisme, terorisme dan lain-lain. Kemudian juga perlu memperhatikan secara khusus soal isu reformasi Dewan Keamanan PBB.

Daftar Pustaka

Elias, Manuel, “*Germany, Indonesia, South Africa, Dominican Republic, Belgium, elected to Security Council*” *United Nations* <https://news.un.org/en/story/2018/06/1011731/> (Diakses pada 2 Januari 2019)

Ralph, Jason dan Jess Gifkins. “*The Purpose Of United Nations Security Council Practice: Contesting Competence Claims In The Normative Context Created By The Responsibility To Protect*” *European journal of international relations* Vol.23,(2017),<http://eprints.whiterose.ac.uk/103089/10/1354066116669652.pdf> (Diakses pada 2 Januari 2019).

Brussel, KBRI, “*Indonesia-layak-menjadi-Anggota-Tidak-Tetap-Dewan-Keamanan-DK-*

PBB" https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita_perwakilan/Pages/.aspx (Diakses pada 2 Januari 2019)

Santi, Natalia, "Indonesia Terpilih Sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180608220834-134-304758/> (Diakses pada 3 Januari 2019)

Liz, "Indonesia-launches-campaign-for-un-security-council-seat" <https://www.thejakartapost.com/news/2016/09/23/html> (Diakses pada 3 Januari 2019).

Santoso, Dewi and Fadhilah Nafisah. "Indonesia's Global Maritime Axis: Security Concern and Recommendations" <https://ejournal.unair.ac.id/JHI/article/download/7306/4421>, Vol. X No. 2 (Juli-Desember 2017) (Diakses pada 2 Januari 2019).

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Holsti, J. Kalevi. *International Politics: A Framework for Analysis*, Sixth Edition, New Jersey: Prentice-Hall International Editions, 1992.

Rourke. *International Politics on the World Stage*. New York: McGraw-Hill/Dushkin. 2003.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial "Konsep-Konsep Kunci"*. Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015.

Diamond, Louise and John McDonald. *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, West Hartford: Kumarian Press, 1996.

Manhire, Vanessa. *United Nations Handbook 2017-18*, Wellington: Ministry Of Foreign Affairs And Trade, 2017. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Keanggotaan-dan-Pengambilan-Keputusan.aspx>

Nations, United. *Basic facts about*

the united nations, New York: The United Nations Department of Public Information, 2011.

May Rudi, Tengku. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa Bandung, 1993.

Iqbal Ramadhan, "Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. *Intermestic*": Journal of International Studies e-ISSN.2503-443X Volume 2, No. 2, Mei 2018 (109-115) doi:10.24198/intermestic.v2n2.1

Wicaksana, I.G. Wahyu, "A Guide To Theory": *Epistemologi Politik Luar Negeri* Jurnal Global dan Strategis, No. 1, Januari 2007, 12-19. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jgs5d8f9755662full.pdf>. (diakses 26 Maret 2019)

Coulombis, Theodore A and James H. Wolfe. *Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Jersey: Prentice Hall College Div, 2000.

Kuwado, Fabian Januarius, "Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?" <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/17563621/politik-luar-negeri-jokowi-jk-dalam-4-tahun-apa-saja-pencapaiannya?page=all>. Diakses 26 Maret 2019

Anwar, Rosikhan, *Kebijakan Luar Negeri Cerminkan Kepentingan Nasional* <https://career.undip.ac.id/smupdate/read/1021544/kebijakan-luar-negeri-cerminkan-kepentingan-nasional> (diakses 26 Maret 2019)

Guci Syaifudin, Teuku Muhammad, Panglima TNI Beberkan 6 Ancaman terhadap Indonesia, <http://www.tribunnews.com/regional/2016/11/23/panglima-tni-beberkan-6-ancaman-terhadap-indonesia>